



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru beberapa bulan dilaksanakan.

Sesuai dengan lampiran VI Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahap Penyajian Rancangan Renja SKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kota Bandar Lampung, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah



pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung. BPKAD memiliki 29 indikator sasaran seperti yang tercantum pada Renstra BPKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.

Tabel 2.1 Indikator Sasaran BPKAD Kota Bandar Lampung tahun 2016 – 2021

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	3	4	4	5	5
2	Pemenuhan operasional peralatan, perlengkapan dan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
3	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat keuangan dan aset daerah.	30 orang	30 orang	30 orang	35 orang	35 orang	35 orang
4	Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian KUA dan PPAS	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari
5	Tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RPAPBD	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari
6	Ketersediaan dana yang seimbang antara arus kas masuk (pendapatan) dengan arus kas keluar (belanja) serta pembiayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Realisasi SPD terhadap anggaran belanja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tingkat SKPD yang menggunakan Pedoman Pelaksanaan APBD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD
9	Tepat waktu pembayaran Iuran Wajib Pajak, Iuran taperum, Iuran BPJS dan Iuran JKK/JKN. (penerbitan sebelum tanggal sepuluh pada setiap bulan dalam setahun).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Realisasi Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Kota B. Lampung						
11	Tepat waktu pembuatan SKPP	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
12	Tepat waktu penerbitan Daftar Gaji SKPD (penerbitan sebelum tanggal sepuluh pada setiap bulan dalam setahun).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penerbitan SP2D yang lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Tertibnya penyampaian Surat Pertanggungjawaban Fungsional SKPD (SPJ-SKPD)	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD	54 SKPD
15	Tersedianya Peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Tersajinya informasi saldo keuangan daerah setiap hari kerja dalam setahun.	264 hari	264 hari	264 hari	264 hari	264 hari	264 hari
17	Penerbitan BG yang sah dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tersedianya informasi pajak Pemerintahan Kota Bandar Lampung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
19	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Waktu penyampaian laporan aset yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Jumlah Aset yang diamankan melalui pemasangan Plang Nama Aset Pemkot	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah	40 buah
23	Terlaksananya Penilaian dan Penghapusan BMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	sesuai dengan Usulan SKPD						
24	Jumlah kasus aset daerah terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Ketersediaan Basis data APBD yang terpelihara	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
26	Rekonsiliasi data pegawai dengan SKPD	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
27	Rekonsiliasi penerimaan/pengeluaran KASDA dengan Bank Lampung	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
28	Ketersediaan basis data laporan keuangan yang terpelihara	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
29	Ketersediaan Basis Data BMD yang akurat	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali

Rencana Kerja BPKAD Kota Bandar Lampung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPKAD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kota Bandar Lampung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPKAD Kota Bandar Lampung selama Tahun 2016 dan perkiraan target Tahun 2017.

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :



1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja RPJMD :

1. Opini BPK atas LKPD;

Indikator Kinerja Renstra :

1. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Pemenuhan operasional peralatan, perlengkapan dan administrasi perkantoran;
3. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat keuangan dan aset daerah;
4. Tingkat ketepatan waktu penyampaian KUA dan PPAS;
5. Tingkat ketepatan waktu penyampaian RAPBD dan RPAPBD;
6. Ketersediaan dana yang seimbang antara arus kas masuk (pendapatan) dengan arus kas keluar (belanja) serta pembiayaan;
7. Jumlah Realisasi SPD terhadap anggaran belanja;
8. Tingkat SKPD yang menggunakan Pedoman Pelaksanaan APBD;
9. Tepat waktu pembayaran Iuran Wajib Pajak, Iuran taperum, Iuran BPJS dan Iuran JKK/JKN;
10. Realisasi Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah Kota B. Lampung;
11. Tepat waktu pembuatan SKPP;
12. Tepat waktu penerbitan Daftar Gaji SKPD;
13. Penerbitan SP2D yang lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu;



14. Tertibnya penyampaian Surat Pertanggungjawaban Fungsional SKPD (SPJ-SKPD);
15. Tersedianya Peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja;
16. Tersajinya informasi saldo keuangan daerah setiap hari;
17. Penerbitan BG yang sah dan sesuai ketentuan yang tepat waktu;
18. Tersedianya informasi pajak Pemerintahan Kota Bandar Lampung;
19. Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu;
20. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahan daerah;
21. Waktu penyampaian laporan aset yang tepat waktu;
22. Jumlah Plang nama aset yang terpasang;
23. Terlaksananya Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan SKPD;
24. Jumlah kasus aset daerah terselesaikan;
25. Ketersediaan Basis data APBD yang terpelihara;
26. Rekonsiliasi data pegawai dengan SKPD;
27. Rekonsiliasi penerimaan/pengeluaran KASDA dengan Bank Lampung;
28. Ketersediaan basis data laporan keuangan yang terpelihara;
29. Ketersediaan Basis Data BMD yang akurat.

Indikator Kinerja Renja :

Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Terlaksananya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator Kinerja kegiatan :

1. Pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet selama 1 tahun;
2. Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas dan Jabatan selama 1 tahun;
3. Tersedianya Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan selama 1 tahun;
4. Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun;
5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan;



6. Tersedianya alat-alat kelistrikan, instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor selama 1 tahun;
7. Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga selama 1 tahun;
8. Tersedianya Surat kabar, Majalah Lokal dan Nasional selama 1 tahun;
9. Tersedianya makanan dan minuman Rapat selama 1 tahun;
10. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun;
11. Tersedianya Honorarium Pengelola Administrasi perkantoran selama 1 tahun;
12. Terpenuhiya tertib administrasi surat menyurat kedinasan yang baik.

Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur :
Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur BPKAD kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor selama 1 tahun;
2. Tersedianya Alat - alat gedung kantor selama 1 tahun;
3. Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional selama 1 tahun;
4. Tersedianya Mebeleur Kantor selama 1 tahun;
5. Tersedianya Komputer PC/ Notebook serta kelengkapannya penunjang Tupoksi kerja selama 1 tahun;
6. Terpeliharanya kualitas gedung kantor selama 1 tahun;
7. Tersedianya Service dan Suku cadang serta BBM mobil jabatan selama 1 tahun;
8. Tersedianya Service dan Suku cadang serta BBM kendaraan operasional selama 1 tahun;
9. Tersedianya Pemeliharaan Mebeleur kantor selama 1 tahun;
10. Tersedianya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor selama 1 tahun;
11. Tersedianya ruang arsip yang representatif sehingga memudahkan pengelompokan berdasarkan penggunaan.



Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan dan aset daerah

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD.

Indikator Kegiatan :

1. Tersusunnya LKIP, LPPD, LPJ dan LKPD SKPD yang tepat waktu dan berkualitas;
2. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Penyerapan SKPD;
3. Tersusunnya RENJA, RKA, RKA-P, DPA dan DPPA SKPD.
4. Tersusunnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKAD Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Opini BPK atas LKPD
2. Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan P-APBD
3. Ketepatan Waktu Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Jumlah Perda tentang APBD;
2. Jumlah Perwal tentang Penjabaran APBD;
3. Jumlah Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD;



4. Jumlah Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD;
5. Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Keuangan Tugas Pembantuan SKPD selama 1 tahun;
6. Jumlah kasus tanah yang terselesaikan selama 1 tahun;
7. Tersedianya Basis Data Penyusunan Laporan Keuangan;
8. Tersedianya laporan Penerimaan dan Setoran Pajak selama 1 tahun;
9. Jumlah Data dan Laporan Belanja Hibah dan Bansos;
10. Persentase Tersusunnya Arsip Belanja Hibah dan Bansos selama 1 tahun;
11. Tersedianya Data Gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung;
12. Jumlah Laporan semester I dan Prognosis Semester II;
13. Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Keuangan antar SKPD dan pihak terkait selama 1 tahun;
14. Jumlah tersusunnya dokumen administrasi pelaksanaan penatausahaan pinjaman daerah kota Bandar Lampung;
15. Tersusunnya Laporan dan Daftar Mutasi barang;
16. Persentase Terfasilitasinya Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD;
17. Persentase tercetaknya Daftar gaji Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung dan SKPP Pegawai;
18. Jumlah SK Kepala Badan tentang Anggaran Kas APBD;
19. Jumlah SK Kepala Badan tentang Anggaran Kas Perubahan APBD;
20. Jumlah dokumen Laporan Realisasi SPD;
21. Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS Perubahan;
22. Jumlah peraturan dan keputusan tentang kebijakan belanja;
23. Jumlah dokumen penyusunan KUA dan PPAS;
24. Terpasangnya Plang Papan Nama Aset Daerah;
25. Jumlah Perwal tentang Pedoman Pelaksanaan APBD;
26. Persentase Penerbitan SP2D secara tepat waktu setelah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku;

